

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara sehingga perusahaan melakukan pengurangan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Data economy.okezone.com mengungkapkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa target pendapatan negara pada 2015 adalah sebesar Rp1.761,8 triliun, dengan sumber pendapatan yang dominan dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun. Namun mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar Rp248,9 triliun dari target sebesar Rp1.489,3 triliun. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu masih rendahnya pengawasan dalam penyetoran pajak. Pemerintah perlu melakukan pengawasan-pengawasan dengan dilakukannya verifikasi data di lapangan serta perlu dilakukan penegakkan hukum terhadap penyelewengan pajak.

Dilihat dari fenomena di atas dari sudut pandang kebijakan pajak, praktik penghindaran pajak berdampak pada tergerusnya basis pajak yang merugikan negara dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efesiensi dari suatu sistem perpajakan. Untuk itu kontribusi pajak harus lebih dioptimalkan karena kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (Sarra, 2017).

Dalam upaya mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini beresiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Akan tetapi wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Menurut Hidayati dan Fidiana (2017) perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut World Bank Group tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar serta masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana keberlangsungan hidup masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sama-sama ditunjukkan untuk kesejahteraan umum, namun perbedaanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian di distribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikelola perusahaan untuk kemudian di distribusikan kepada masyarakat umum.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Good Corporate Governance (GCG) dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. *Good Corporate Governance* (GCG) akan diproksikan dengan proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Komisaris Independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) dengan melihat pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil berpengaruh negatif. Sebagian besar komisaris independen pada perusahaan tidak bekerja dengan maksimal karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal.

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia harus membentuk komite audit. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tugas dan tanggung jawab komite audit secara umum terdapat tiga bidang yaitu laporan keuangan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan pengawasan

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait kebijakan beban pajak yang berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak.

Damayanti dan Susanto (2015) mendefinisikan kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya yaitu transparansi dari salah satu unsur *Good Corporate Governance* (GCG). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemilik saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan jika mereka tahu sebelumnya. Hidayati dan Fidiana (2017) mengungkapkan audit yang berkualitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berukuran besar (*Big Four Accounting Firm*) dimana manager

akan lebih sulit memanipulasi laba ditunjukkan untuk kepentingan perpajakan, karena Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dapat melakukan audit lebih berkualitas karena diberikan banyak pelatihan dan diakui secara internasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan KAP Non *Big Four*, sehingga perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* tidak melakukan penghindaran pajak.

Sarra (2017) menjelaskan bahwa konservatisme merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi. Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran, sehubungan dengan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dengan tingkat yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. Hal ini menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam

mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Tindakan ini termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan sebagai dasar menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin konservatif suatu laporan keuangan, maka tindakan penghindaran pajak akan semakin besar.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal karena kurang ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong besar memiliki sumber daya lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif

dalam perpajakan (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik penghindaran pajak karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) adalah penambahan variabel konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel konservatisme akuntansi adalah memberikan ketepatan hasil laporan keuangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan sehingga dapat diketahui apakah konservatisme akuntansi mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sundari dan Apriliana, 2017). Sedangkan alasan penambahan variabel ukuran perusahaan adalah pengelolaan perpajakan pada perusahaan yang tergolong kecil tidak optimal dan pada perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola pajak dengan optimal sehingga dapat diketahui apakah ukuran perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Selain itu sampel yang digunakan juga berbeda pada penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012 sampai dengan 2015 sedangkan pada penelitian ini memilih sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Perusahaan *property* dan *real estate* mengalami perkembangan yang sangat pesat harga *property* semakin naik dan kebutuhan masyarakat seperti membeli tanah dan membangun rumah juga meningkat. Maka dengan naiknya harga *property* perusahaan mendapatkan keuntungan yang juga meningkat dan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayar sehingga banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dari berbagai peneliti terdahulu memberikan motivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai penghindaran pajak dengan judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016”**

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari dari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di batasi oleh variabel: *corporate social responsibility*, *good corporate governance* yang meliputi komisarisi independen, komite audit, kualitas audit serta terdapat variabel konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan.
3. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan laporan keuangan tahun 2012 sampai 2016.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisarisi independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis apakah konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan manfaat dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan atau penelitian dengan obyek yang sejenis.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah sehingga dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

3. Bagi perusahaan

Memberikan masukan dan dorongan bagi manajemen perusahaan dalam perencanaan pajak yang bersifat legal atau ilegal. Sehingga dapat menjauhkan perusahaan dari sanksi hukum atas penyimpangan pajak yang dapat dilakukan.

4. Bagi investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berinvestasi dan menilai bagaimana kecenderungan penghindaran pajak dilihat dari sisi *corporate social responsibility, good corporate governance*, konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan.

5. Bagi pembaca dan kajian penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai peraturan perpajakan pada perusahaan sehingga kekurangan yang terdapat pada penelitian ini diharapkan dikembangkan di penelitian selanjutnya.